



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 901 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2019 - 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019 – 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertujuan :
- a. Sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu, menyeluruh dan adaptif Tahun 2019 - 2024; dan
 - b. memberikan panduan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu, menyeluruh dan adaptif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka waktu tahun 2019 - 2024.
- KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019 – 2024 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan :
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 674 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berjalan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Juli 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 901 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JULI 2022

**PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2019 - 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Misi ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern. Untuk mewujudkan Misi tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern dengan Indikator capaian Tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Agar Tujuan RPJMD dimaksud dapat diwujudkan, maka dirumuskan Sasaran Strategis RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan salah indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian SPBE merupakan salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

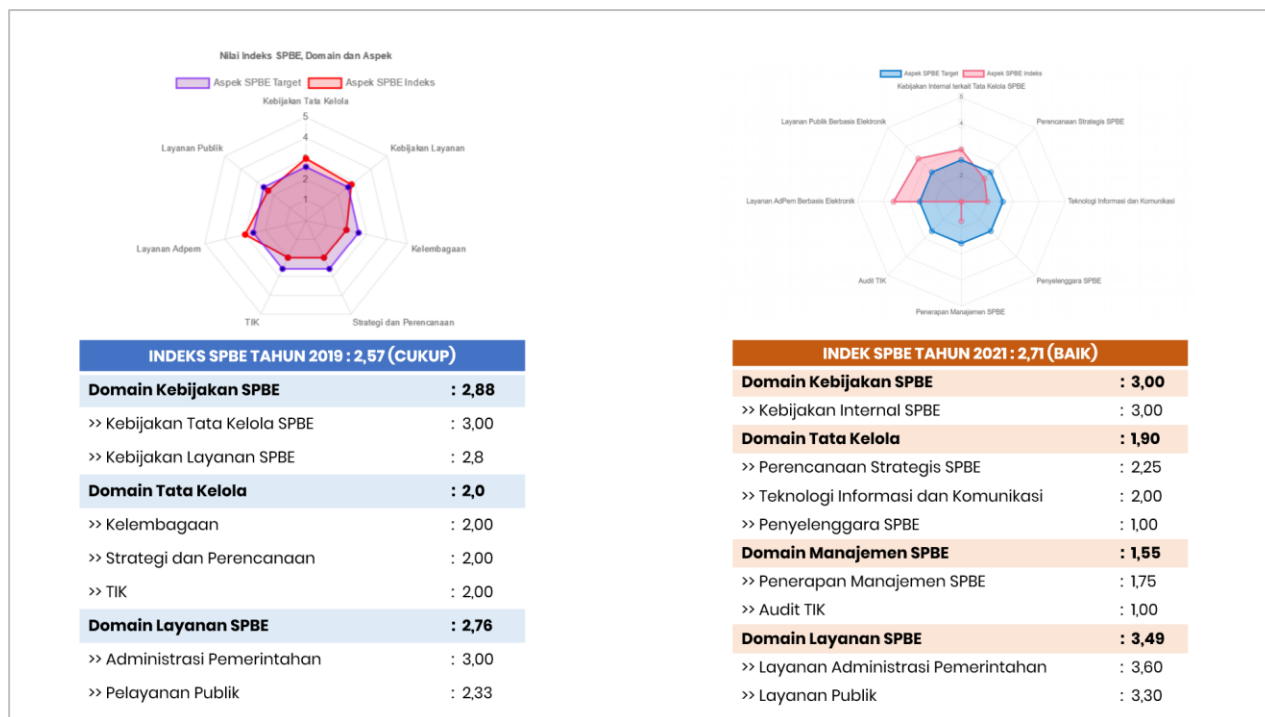
Kebijakan ini tentunya sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yaitu instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Untuk mendorong adanya kesaturan gerak Langkah dalam percepatan penyelenggaraan SPBE pada Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang terkait dengan unsur-unsur SPBE termasuk terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selanjutnya, berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 674 Tahun 2021, ditemukan sejumlah kekurangan dalam cakupan Peta Rencana SPBE, utamanya pada penjabaran insiatif strategis pada setiap referensi dan muatan Peta Rencana SPBE, sehingga dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Agar SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terselenggara secara sinergis dan terpadu, maka diperlukan Peta Rencana SPBE yang berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

B. Kondisi SPBE Tahun 2021

Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB, maka Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 sebesar 2,57 dengan predika Cukup dan tahun 2021 sebesar 2,71 atau dengan Predikat Baik. Gambaran umum Indeks SPBE Tahun 2019 dan 2021 dimaksud sebagaimana gambar berikut ini:



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 dan 2021, Kementerian PANRB, 2022

Dengan mencermati hasil evaluasi diatas, maka diketahui sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut :

- Pada aspek kebijakan internail terkait tata kelola SPBE, belum terdapat pengaturan referensi arsitektur SPBE secara lengkap, belum adanya keselarasan dengan peta rencana SPBE Nasional, belum terpenuhi aspek interoperabilitas, belum adanya tercantum proses konsultasi dengan fungsi pengelola IT, belum mengatur interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional, belum mengatur keterhubungan dengan sistem penghubung layanan pemerintah, dan kebijakan masih belum mengatur untuk seluruh unit kerja
- Pada aspek perencanaan strategis SPBE, peta rencana SPBE belum mengatur secara lengkap referensi dan muatan Peta Rencana SPBE, tata kelola Perencanaan dan Penganggaran SPBE belum memenuhi kebijakan SPBE, dan Inovasi Proses Bisnisnya belum diwujudkan dalam bentuk SPBE.
- Pada aspek Penyelenggara SPBE, kinerja Tim Pengarah SPBE belum optimal baik dalam penyelenggaraan kebijakan, implementasi kebijakan, maupun dalam pengembangan dan perbaikan tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE;

- d. Pada aspek manajemen SPBE, belum optimalnya penerapan manajemen SPBE, utamanya pada aspek manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE.
- e. Pada aspek Audit TIK, belum optimalnya perencanaan pelaksanaan Audit TIK dan penerapan audit yang belum memenuhi standar Audit SPBE;
- f. Pada aspek layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, interoperabilitas layanan serta tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan reviu belum berjalan secara optimal untuk meningkatkan tingkat kematangan layanan.

C. Kondisi Yang Diinginkan

Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka pada tahun 2024 diharapkan kondisi kualitas SPBE berada pada indeks 3,17 (Baik) sehingga pada akhir periode Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, indeks SPBE ditargetkan mencapai 3,59 (Sangat Baik), sebagaimana dapat dipetakan pada tabel berikut:

Capaian Nilai Indeks, Domain, dan Aspek SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar		2021	2024
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	2,71	3,59
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	3	4
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%	3	4
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	1,9	9
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2,25	3
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	2	3
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	1	3
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,50%	1,55	6
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	1,75	3
Aspek 6 - Audit TIK	4,50%	1	3
Domain 4 - Layanan SPBE	45,50%	3,49	8
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan	27,50%	3,6	4
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%	3,33	4

Kondisi kualitas SPBE pada akhir periode Peta Rencana SPBE ini, ditandai dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. tersedianya Kebijakan SPBE yang memenuhi tingkat kematangan kapabilitas proses level optimum, pada aspek kebijakan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK serta Tim Koordinasi SPBE.
- b. Terselenggaranya Tata Kelola SPBE mencapai tingkat kematangan kapabilitas proses level optimum, pada aspek tata kelola arsitektur, peta rencana, anggaran, proses bisnis, jaringan intra pemerintah, pusat data, sistem penghubung layanan, dan penyelenggara SPBE, yang meningkat secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

- c. Manajemen SPBE mencapai tingkat kematangan kapabilitas proses level optimum, pada aspek penerapan manajemen SPBE mencakup manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan SPBE, serta audit teknologi informasi dan komunikasi, yang meningkat secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.
- g. Layanan SPBE mencapai tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis level optimal baik pada aspek layanan administrasi pemerintahan secara elektronik maupun aspek layanan publik secara elektronik, yang mampu dan cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

D. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024
13. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE

A. Visi SPBE

Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Visi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang terpadu, menyeluruh dan adaptif untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”**.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu pada seluruh Perangkat Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah daerah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

B. Misi SPBE

Untuk mewujudkan Visi SPBE, misi SPBE adalah :

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal;
4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

C. Tujuan SPBE

Berdasarkan Visi dan Misi SPBE, tujuan SPBE adalah :

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

D. Sasaran SPBE

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan SPBE, Sasaran SPBE adalah :

1. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.
2. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
3. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
4. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap memperhatikan keselarasan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan Strategi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu, diarahkan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE, meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga terwujud SPBE yang terpadu, dengan strategi :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi termasuk masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - b. Meningkatkan harmonisasi kebijakan SPBE Pemerintah Daerah dengan kebijakan SPBE yang telah diterbitkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - c. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi berkala dan reviu berkelanjutan dalam penerapan kebijakan SPBE dan tindaklanjuti hasil evaluasi.
2. Penguatan Tata Kelola SPBE yang terpadu internal dan eksternal Pemerintah Daerah, dengan strategi :
 - a. Pemantapan Perencanaan Strategis SPBE dalam arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE;
 - b. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, Jaringan Intra Instansi, Sistem Penghubung Layanan;
 - c. Penguatan Penyelenggara SPBE meliputi Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE.
3. Optimalisasi pengembangan manajemen SPBE, dengan strategi :
 - a. Optimalisasi penerapan manajemen SPBE, meliputi: manajemen resiko SPBE, manajemen keamanan SPBE, manajemen Data, manajemen Aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layann SPBE;
 - b. Optimalisasi Audit TIK, mencakup: audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.

4. Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat, dengan strategi :
 - a. Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi;
 - b. Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan;
 - c. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna, tepat sasaran, serta terintegrasi di dalam dan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas SPBE yang efisien dan efektif mendorong peningkatan kualitas layanan SPBE, dengan strategi :
 - a. Penyediaan Pusat Data yang memadai;
 - b. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah yang memadai;
 - c. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan.
 - d. Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE
6. Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi SPBE secara optimal dengan strategi:
 - a. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE.
 - b. mengoptimalkan aplikasi umum yang telah ditetapkan pemerintah dan yang belum untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan pembangunan
 - c. Pembangunan Portal Data untuk mendukung kebijakan Satu Data
 - d. Koordinasi dan konsultasi pemanfaatan aplikasi khusus dan pengembangan Aplikasi Khusus.
7. Penguatan Keamanan SPBE, dengan strategi:
 - a. Penjaminan kerahasiaan SPBE melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
 - b. Penjaminan keutuhan melalui pendeteksian modifikasi.
 - c. Penjaminan ketersediaan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
 - d. Penjaminan keaslian melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
 - e. Penjaminan kenirsangkalan melalui penerapan sertifikasi elektronik dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keamanan Siber
8. Penguatan Audit SPBE, dengan strategi:
 - a. Peningkatan kualitas Audit SPBE terkait penerapan tata kelola dan manajemen SPBE; fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya
 - b. Peningkatan kualitas Audit SPBE yang mencakup audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit Keamanan SPBE.
 - c. Peningkatan Kerjasama dalam Audit SPBE, bekerja sama dengan lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi internal atau dengan memanfaatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB IV

PETA RENCANA STRATEGIS

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

A. Rencana Strategis

Rencana strategis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu :

1. Tahap pembangunan fondasi SPBE (2019-2022)

Tahapan ini difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

- a. Kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Arsitektur SPBE Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Peta Rencana SPBE Kabupaten Polewali Mandar
- d. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- e. Kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan kebijakan SPBE;
- f. Manajemen SPBE sesuai Kebijakan SPBE;
- g. Peningkatan kualitas kematangan kapabilitas fungsi teknis pada layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik;
- h. Peningkatan kualitas kematangan kapabilitas Infrastruktur SPBE;
- i. Peningkatan kualitas portal administrasi pemerintahan, layanan publik, dan portal data Pemerintah Daerah;
- j. Standar kompetensi teknis SPBE; dan
- k. Monitoring, Evaluasi, Reviu dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;.

2. Tahap pengembangan SPBE (2023 – 2024)

Tahapan pengembangan SPBE ini difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

- a. Kebijakan internal SPBE dengan tingkat kematangan optimum;
- b. Perencanaan Strategis SPBE dengan tingkat kematangan optimum;
- c. Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tingkat kematangan optimum;
- d. Penerapan Manajemen SPBE dengan tingkat kematangan optimum;
- e. Audit teknologi informasi dan komunikasi dengan tingkat kematangan optimum;
- f. Layanan administrasi pemerintahan dengan tingkat kematangan optimal; dan

- g. Layanan publik dengan tingkat kematangan optimal.

B. Inisiatif Strategis

Inisiatif strategis dideskripsikan pada area Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE.

1. Tata Kelola SPBE

- a. Melaksanakan reviu atas Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menghasilkan tindak lanjut perbaikan kualitas penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan;
- b. Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Penyempurnaan Kebijakan Arsitektur SPBE agar sesuai dengan pedoman dan standar penyusunan Arsitektur SPBE;
- d. Penyempurnaan Kebijakan Peta Rencana SPBE agar mencakup secara lengkap seluruh muatan Peta Rencana SPBE;
- e. Penyempurnaan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran SPBE, agar terwujud keterpaduan penyelenggaraan program dan kegiatan SPBE dan memenuhi prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas;
- f. Penyempurnaan Kebijakan Proses Bisnis SPBE dan dituangkan ke dalam sistem elektronik;
- g. Penyempurnaan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE agar dalam penerapannya dapat memenuhi siklus pembangunan aplikasi;
- h. Penyempurnaan kebijakan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan Sistem Penghubung Layanan.
- i. Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan-Kebijakan terkait Manajemen SPBE.
- j. Penguatan Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran SPBE;
- k. Penyempurnaan Proses Bisnis SPBE dengan menerapkan *Business Process Reengineering*, agar semakin efektif dan efisien;
- l. Perbaiki tata kelola pembangunan aplikasi SPBE agar lebih terpadu dan sesuai siklus pembangunan/ pengembangan aplikasi
- m. Perbaiki tata kelola layanan pusat data dengan mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Data Nasional;
- n. Perbaiki tata kelola pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terpadu dan terkendali pada seluruh Perangkat Daerah;
- o. Perbaiki tata kelola pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terpadu dan terkendali pada seluruh Perangkat Daerah;
- p. Penguatan peran dan fungsi Tim Koordinasi SPBE untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE;
- q. Penyelenggaraan dan penguatan Forum Kolaborasi SPBE untuk percepatan penerapan prinsip-prinsip SPBE di seluruh Perangkat Daerah.

2. Manajemen SPBE

- a. Pengembangan penerapan manajemen resiko melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- b. Pengembangan penerapan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE, termasuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik BSSN.
- c. Pengembangan penerapan manajemen data melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- d. Pengembangan penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- e. Pengembangan penerapan manajemen sumber daya manusia melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- f. Pengembangan penerapan manajemen pengetahuan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- g. Pengembangan penerapan manajemen perubahan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- h. Pengembangan penerapan manajemen layanan SPBE melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- i. Pengembangan penerapan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi: audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit Keamanan SPBE.

3. Layanan SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE
- b. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
- c. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.
- d. Penyiapan dan Perbaikan Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan Administrasi Pemerintahan;
- e. Penyiapan dan Perbaikan Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan Publik;
- f. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan

layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.

4. Infrastruktur SPBE

- a. Penyediaan Pusat Data untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data;
- b. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah yang merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
- c. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi yang dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal peran gkat IoT. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
- d. Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta dengan memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai.

5. Aplikasi SPBE

- a. Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE.
- b. Penggunaan aplikasi umum yang telah ditetapkan Pemerintah dan mengoptimalkan aplikasi umum yang belum ditetapkan Pemerintah untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan pembangunan
- c. Pembangunan Portal Data untuk mendukung kebijakan Satu Data yang merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
- d. Koordinasi dan konsultasi pemanfaatan aplikasi khusus dan pengembangan Aplikasi Khusus dengan tetap memperhatikan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

6. Keamanan SPBE

- a. Penjaminan kerahasiaan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- b. Penjaminan keutuhan melalui pendeteksian modifikasi.
- c. Penjaminan ketersediaan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- d. Penjaminan keaslian melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- e. Penjaminan kenirsangkalan melalui penerapan sertifikasi elektronik dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keamanan Siber

7. Audit SPBE

- a. Audit SPBE terkait penerapan tata kelola dan manajemen SPBE, fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya
- b. Audit SPBE mencakup audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit Keamanan SPBE.
- c. Pemerintah Daerah melaksanakan Audit SPBE internal dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Audit Tools BRIN.
- d. Audit SPBE dapat bekerja sama dengan lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi.

C. Rencana Strategis

Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE. Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE.

Target pencapaian Rencana Strategis SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Rencana Strategis SPBE
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024

No	Inisiatif Strategis / Program/ Kegiatan	Keluaran	PIC	Target Waktu					
				2019	2020	2021	2022	2023/2024	
I	Tata Kelola								
A	Penguatan Kebijakan SPBE dan Perencanaan Strategis SPBE								
1	Reviu Hasil Evaluasi SPBE dan Rencana Tindak Lanjut	Rencana Tindak Lanjut	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
2	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Kebijakan Internal SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
3	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
4	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Peta Rencana SPBE	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
5	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran SPBE	Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
6	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Proses Bisnis SPBE	Kebijakan Proses Bisnis SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
7	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
8	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Layanan Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
9	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kebijakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
10	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Penghubung Layanan SPBE	Kebijakan Sistem Penghubung Layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
11	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan-Kebijakan terkait Manajemen SPBE	Kebijakan Manajemen SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
B	Perbaiki Tata Kelola SPBE								
1	Penguatan Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran SPBE	Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran SPBE	BappedaLitbang - Badan Keuangan - Dinas KomininfoSP	√	√	√	√	√	√
2	Penyempurnaan Proses Bisnis SPBE	Kebijakan Proses Bisnis SPBE	Bagian Organisasi - Dinas KomininfoSP	√	√	√	√	√	√
3	Perbaiki tata kelola pembangunan aplikasi SPBE agar lebih terpadu dan sesuai siklus pembangunan/ pengembangan aplikasi	Tata Kelola pembangunan aplikasi SPBE	Dinas Komininfo SP	√	√	√	√	√	√

	4	Perbaikan tata kelola layanan pusat data dengan mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Data Nasional	Tata Kelola layanan pusat data	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	5	Perbaikan tata kelola pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terpadu dan terkendali pada seluruh Perangkat Daerah	Tata Kelola tata kelola pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	6	Perbaikan tata kelola pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terpadu dan terkendali pada seluruh Perangkat Daerah	Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	7	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut	Rencana Tindak Lanjut	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
	C Pembentukan dan Penguatan Tim Koordinasi SPBE								
	1	Penguatan dan Optimalisasi Koordinasi Tim Koordinasi SPBE	Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE	Sekretaris Daerah	√	√	√	√	√
	2	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	Sosialisasi dan Konsultasi SPBE	Sekretaris Daerah	√	√	√	√	√
	3	Penguatan Kolaborasi Penerapan SPBE	Forum Kolaborasi SPBE	Sekretaris Daerah	√	√	√	√	√
II	Manajemen SPBE								
	A Manajemen Resiko SPBE								
	1	Penyiapan Pedoman Pelaksana Manajemen Resiko di lingkungan Pemerintah Daerah	Kebijakan Manajemen Resiko	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	2	Penguatan Komite Manajemen Resiko	Terbentuknya Komite Manajemen Resiko	Inspektorat	√	√	√	√	√
	3	Penguatan Unit Kepatuhan Resiko	Terbentuknya Unit Kepatuhan Resiko	Inspektorat	√	√	√	√	√
	4	Komunikasi dan Konsultasi Penerapan Manajemen Resiko	Rekomendasi Penerapan Manajemen Resiko	Inspektorat	√	√	√	√	√
	5	Penetapan Konteks Resiko	Penetapan Konteks Resiko	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	6	Penilaian Resiko SPBE	Penilaian Resiko SPBE	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	7	Penanganan Resiko SPBE	Penanganan Resiko SPBE	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	8	Pemantauan dan Reviu Penerapan Manajemen Resiko	Hasil Reviu Penerapan Manajemen Resiko	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	9	Pencatatan dan Pelaporan Penerapan Manajemen Resiko	Laporan Penerapan Manajemen Resiko	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	10	Membangun Budaya Sadar Resiko	Terbangunnya Budaya Sadar Resiko	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√

B	Manajemen Keamanan Informasi								
1	Penyiapan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi	Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
2	Identifikasi isu internal dan eksternal kewanan informasi SPBE pada Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE	Daftar isu internal dan eksternal kewanan informasi SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
3	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tumbuhnya Kesadaran Keamanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
4	Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE	Potensi Kerentanan Keamanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
5	Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Laporan Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
6	Pengujian Fungsi Keamanan terhadap Aplikasi SPBE	Laporan Pengujian Fungsi Keamanan terhadap Aplikasi SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
7	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Laporan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
8	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	Pemanfaatan Sertifikat Elektroni	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
9	Audit Keamanan SPBE	Laporan Audit Keamanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
10	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Tindak Lanjut Perbaikan Manajemen Keamanan Informasi	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
C	Manajemen Data								
1	Pengelolaan Arsitektur Data	Referensi Arsitektur Data	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
2	Pengelolaan Data Induk dan Data Penunjang, mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan; dan pembaruan	Tersedianya Data Induk dan Data Penunjang	BappedaLitbang - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√	√
3	Pengelolaan Basis Data mencakup identifikasi kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data, pemeriksaan Basis Data penyebarluasan Basis Data melalui Portal Satu Data dan merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data	Terkelolanya Basis Data	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
4	Manajemen kualitas data, mencakup kesesuaian standar data dan ketersediaan metadata, serta validasi dan pemantauan perbaikan kualitas data secara berkelanjutan	Tersedianya standar data dan metadata	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
5	Integrasi Portal Polewali Mandar Satu Data dengan Satu Data Indonesia	Integrasi Portal Polewali Mandar Satu Data dengan Satu Data Indonesia	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
6	Pemanfaatan dan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional untuk pengembangan data spasial	Terkelolanya Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√	√
7	Penyelenggaraan Forum Satu Data	Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Data	BappedaLitbang	√	√	√	√	√	√
8	Penilaian Kualitas Data dan Pemberiaan Penghargaan Data Award	OPD Penerima Data Award	BappedaLitbang - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√	√

	9	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Penerapan Manajemen Data	Tindak Lanjut Perbaikan Manajemen Data	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
D	Manajemen Aset TIK								
	1	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Aset TIK	Pedoman Manajemen Aset TIK	Bidang Aset Badan Keuangan - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	2	Perbaikan Penerapan Perencanaan Aset TIK	Dokumen Perencanaan Aset TIK	Bidang Aset Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	3	Perbaikan Penerapan Pengadaan Aset TIK	Dokumen Pengadaan Aset TIK	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	√	√	√	√	√
	4	Perbaikan Penerapan Penatausahaan Aset TIK	Dokumen Penatausahaan Aset TIK	Bidang Aset Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	5	Perbaikan Penerapan Pengelolaan Aset TIK	Dokumen Pengelolaan Aset TIK	Bidang Aset Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	6	Perbaikan Penerapan Penghapusan Aset TIK	Dokumen Penghapusan Aset TIK	Bidang Aset Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	7	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Penerapan Manajemen Aset TIK	Tindak Lanjut Perbaikan Manajemen Aset TIK	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
E	Manajemen SDM SPBE								
	1	Penyiapan Pedoman Pengembangan Kompetensi SDM	Kebijakan Pedoman Pengembangan Kompetensi SDM	Bidang Diklat BKPP	√	√	√	√	√
	2	Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	Rencana Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	Bidang Diklat BKPP	√	√	√	√	√
	3	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	Bimbingan Teknis dan Pelatihan SPBE	Bidang Diklat BKPP	√	√	√	√	√
	4	Pembinaan Kompetensi SDM SPBE	SDM yang menerima penguatan kompetensi	Bidang Diklat BKPP	√	√	√	√	√
	5	Pendayagunaan SDM SPBE	SDM yang produktif dalam penyelenggaraan SPBE	Bidang Diklat BKPP	√	√	√	√	√
	6	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Penerapan Manajemen SDM SPBE	Tindak Lanjut Perbaikan Manajemen SDM SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
F	Manajemen Pengetahuan								
	1	Penyiapan Pedoman Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE	Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	2	Penentuan Pengetahuan sebagai Aset Pengetahuan SPBE	Daftar Pengetahuan sebagai Aset Pengetahuan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	3	Pendokumentasian aset Pengetahuan SPBE baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah	Dokumentasi Pengetahuan sebagai Aset Pengetahuan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√

	4	Penataan aset pengetahuan SPBE	Terkelolanya aset pengetahuan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	5	Penyediaan akses bagi pengguna untuk memperoleh aset pengetahuan SPBE secara mudah (online)	Aplikasi berbasis web Manajemen Pengetahuan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	6	Pemanfaatan aset pengetahuan SPBE untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja	Meningkatnya pengunjung pengguna aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	7	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE	Tindak Lanjut Perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
G Manajemen Perubahan SPBE									
	1	Penyiapan Pedoman Manajemen Perubahan SPBE	Pedoman Manajemen Perubahan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	2	Perencanaan Perubahan SPBE	Perencanaan Perubahan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	3	Analisis Perubahan SPBE	Analisis Perubahan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	4	Pengembangan	Dokumentasi Pengembangan	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	5	Implementasi Perubahan SPBE	Implementasi Perubahan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	6	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE	Tindak Lanjut Perbaikan Manajemen Perubahan SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
H Manajemen Layanan SPBE									
	1	Penyiapan Pedoman Manajemen Layanan SPBE	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	2	Penerapan Manajemen Gangguan Layanan SPBE	Tersedianya aplikasi berbasis web Layanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	3	Manajemen Masalah Layanan SPBE	Inventarisasi Masalah Layanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	4	Manajemen Konfigurasi Layanan SPBE	Konfigurasi Layanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	5	Manajemen Perubahan Layanan SPBE	Penanganan layanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	6	Manajemen Rilis Layanan SPBE	Rilis Layanan SPBE	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	7	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Tindak Lanjut Perbaikan Manajemen Layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
I Audit TIK									
	1	Penyiapan pedoman pelaksanaan audit internal TIK	pedoman pelaksanaan audit internal TIK	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	2	Pembentukan dan Penguatan Tim Audit Internal TIK	Tim Audit Internal TIK	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	3	Penyusunan Rencana dan Jadwal Audit Internal TIK	Jadwal Audit Internal TIK	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√

	4	Pemanfaatan Aplikasi Audit Tools BRIN	Akun Auditor dan Auditee Aplikasi Audit Tools BRIN	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	5	Pelaksanaan Audit Aplikasi	Audit Aplikasi	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	6	Pelaksanaan Audit Infrastruktur	Audit Infrastruktur	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	7	Pelaksanaan Audit Keamanan Informasi	Audit Keamanan Informasi	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	8	Koordinasi dan pendampingan tindak lanjut hasil Audit Internal TIK	tindak lanjut hasil Audit Internal TIK	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
III	Layanan SPBE								
A	Penyiapan dan Perbaikan Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan Administrasi Pemerintahan, mencakup:								
	1	Layanan Perencanaan	Perbaikan layanan Perencanaan	BappedaLitbang	√	√	√	√	√
	2	Layanan Penganggaran	Perbaikan layanan Penganggaran	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	3	Layanan Keuangan	Perbaikan layanan Keuangan	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	4	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Perbaikan layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ	√	√	√	√	√
	5	Layanan Kepegawaian	Perbaikan layanan Kepegawaian	BKPP	√	√	√	√	√
	6	Layanan Kearsipan Dinamis	Perbaikan layanan Kearsipan Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√	√	√	√	√
	7	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perbaikan layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	8	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Perbaikan layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Bagian Organisasi Setda	√	√	√	√	√
	9	Layanan Kinerja Pegawai	Perbaikan layanan Kinerja Pegawai	BKPP	√	√	√	√	√
	10	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Perbaikan layanan Pengaduan PePerbaikan layanan Publik	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	11	Layanan Data Terbuka	Perbaikan layanan Data Terbuka	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	12	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Perbaikan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum Setda	√	√	√	√	√
B	Penyiapan dan Peningkatan Kematangan Kapabilitas Layanan Publik, mencakup:								
	1	Layanan pada Sektor Industri	Perbaikan layanan pada Sektor Industri	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	2	Layanan pada Sektor Perdagangan	Perbaikan layanan pada Sektor Perdagangan	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	3	Layanan pada Sektor Pertanian	Perbaikan layanan pada Sektor Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√

4	Layanan pada Sektor Perkebunan	Perbaikan layanan pada Sektor Perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
5	Layanan pada Sektor Peternakan	Perbaikan layanan pada Sektor Peternakan	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
6	Layanan pada Sektor Perikanan	Perbaikan layanan pada Sektor Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√
7	Layanan pada Sektor Investasi	Perbaikan layanan pada Sektor Investasi	Dinas PMPTSP	√	√	√	√	√
8	Layanan pada Sektor Perizinan	Perbaikan layanan pada Sektor Perizinan	Dinas PMPTSP	√	√	√	√	√
9	Layanan pada Sektor Koperasi	Perbaikan layanan pada Sektor Koperasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
10	Layanan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah	Perbaikan layanan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
11	Layanan pada Sektor Pariwisata	Perbaikan layanan pada Sektor Pariwisata	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	√	√	√	√	√
12	Layanan pada Sektor Pekerjaan Umum	Perbaikan layanan pada Sektor Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
13	Layanan pada Sektor Penataan Ruang	Perbaikan layanan pada Sektor Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
14	Layanan pada Sektor Transmigrasi	Perbaikan layanan pada Sektor Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
15	Layanan pada Sektor Transportasi/ Perhubungan	Perbaikan layanan pada Sektor Transportasi/ Perhubungan	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√
16	Layanan pada Sektor Perumahan	Perbaikan layanan pada Sektor Perumahan	Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan	√	√	√	√	√
17	Layanan pada Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman	Perbaikan layanan pada Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan	√	√	√	√	√
18	Layanan pada Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perbaikan layanan pada Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√	√	√	√	√
19	Layanan pada Sektor Pertanahan	Perbaikan layanan pada Sektor Pertanahan	Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan	√	√	√	√	√
20	Layanan pada Sektor Pengendalian Penduduk dan KB	Perbaikan layanan pada Sektor Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas P2KBP3A	√	√	√	√	√
21	Layanan pada Sektor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perbaikan layanan pada Sektor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	√	√	√	√

	22	Layanan pada Sektor Kesehatan	Perbaikan layanan pada Sektor Kesehatan	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	23	Layanan pada Sektor Sosial	Perbaikan layanan pada Sektor Sosial	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
	24	Layanan pada Sektor Penanggulangan Bencana	Perbaikan layanan pada Sektor Penanggulangan Bencana	BPBD	√	√	√	√	√
	25	Layanan pada Sektor Pemberdayaan perempuan	Perbaikan layanan pada Sektor Pemberdayaan perempuan	Dinas P2KBP3A	√	√	√	√	√
	26	Layanan pada Sektor Perlindungan Anak	Perbaikan layanan pada Sektor Perlindungan Anak	Dinas P2KBP3A	√	√	√	√	√
	27	Layanan pada Sektor Hukum	Perbaikan layanan pada Sektor Hukum	Bagian Hukum Setda	√	√	√	√	√
	28	Layanan pada Sektor Hak asasi manusia	Perbaikan layanan pada Sektor Hak asasi manusia	BappedaLitbang - Bagian Hukum Setda	√	√	√	√	√
	29	Layanan pada Sektor Pendidikan	Perbaikan layanan pada Sektor Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√	√
	30	Layanan pada Sektor Perpustakaan	Perbaikan layanan pada Sektor Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√	√	√	√	√
	31	Layanan pada Sektor Ketenagakerjaan	Perbaikan layanan pada Sektor Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
	32	Layanan pada Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Perbaikan layanan pada Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	BappedaLitbang	√	√	√	√	√
	33	Layanan pada Sektor Pemuda	Perbaikan layanan pada Sektor Pemuda	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	√	√	√	√	√
	34	Layanan pada Sektor Olah Raga	Perbaikan layanan pada Sektor Olah Raga	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	√	√	√	√	√
	35	Layanan pada Sektor Lingkungan hidup	Perbaikan layanan pada Sektor Lingkungan hidup	Dinas LHK	√	√	√	√	√
	36	Layanan pada Sektor Bina Mental Spiritual	Perbaikan layanan pada Sektor Bina Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√	√
	37	Layanan pada Sektor Kebudayaan	Perbaikan layanan pada Sektor Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√	√
	38	Layanan pada Sektor Informasi	Perbaikan layanan pada Sektor Informasi	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	39	Layanan pada Sektor Komunikasi	Perbaikan layanan pada Sektor Komunikasi	Dinas Kominfo SP	√	√	√	√	√
	40	Layanan pada Sektor Ketentraman dan Ketertiban	Perbaikan layanan pada Sektor Ketentraman dan Ketertiban	SatpolPP	√	√	√	√	√

	41	Layanan pada Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik	Perbaikan layanan pada Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol	√	√	√	√	√
IV	Infrastruktur SPBE								
	A	Optimalisasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Optimalnya Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	B	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	C	Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah	Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	D	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Optimalnya Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
V	Aplikasi SPBE								
	A	Penyiapan dan Perbaikan Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi Teknis Aplikasi Administrasi Pemerintahan, mencakup:							
	1	Aplikasi Dalam Negeri							
	a	Aplikasi Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Pembangunan	√	√	√	√	√
	b	Layanan Pengadaan Secara Online (LPSE)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian PBJ	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian PBJ	√	√	√	√	√
	d	Aplikasi Tingkat Kandungan Produk Dalam Negeri (TKDN)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian PBJ	√	√	√	√	√
	2	Aplikasi Keuangan							
	a	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Bidang Keuangan	kematangan fungsi aplikasi	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Bidang Aset	kematangan fungsi aplikasi	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	c	Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)	kematangan fungsi aplikasi	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	d	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara	kematangan fungsi aplikasi	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Pengiriman Informasi Keuangan Daerah (Sinergi-SIKD)	kematangan fungsi aplikasi	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	f	Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI)	kematangan fungsi aplikasi	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	g	Sistem Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)	kematangan fungsi aplikasi	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	h	Sistem Pelaporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (ALADIN)	kematangan fungsi aplikasi	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	i	Sistem Informasi dan Manajemen Transfer Daerah (SIMTRADA)	kematangan fungsi aplikasi	Badan Keuangan	√	√	√	√	√
	j	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Terpadu	kematangan fungsi aplikasi	Badan Pendapatan	√	√	√	√	√
	k	Ssitem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	kematangan fungsi aplikasi	Badan Pendapatan	√	√	√	√	√
	3	Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional							

	a	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Bidang Perencanaan	kematangan fungsi aplikasi	Bappeda Litbang	√	√	√	√	√
	b	Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)	kematangan fungsi aplikasi	Bappeda Litbang	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Aksi Integrasi Penurunan Stunting	kematangan fungsi aplikasi	Bappeda Litbang	√	√	√	√	√
4	Aplikasi Aparatur Negara								
	a	Monitoring Centre for Prevention (MCP), Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	kematangan fungsi aplikasi	Inspektorat	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Pemeriksaan Keuangan (e-Audit)	kematangan fungsi aplikasi	Inspektorat	√	√	√	√	√
	c	Whistle Blower System (WBS)	kematangan fungsi aplikasi	Inspektorat	√	√	√	√	√
	d	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	kematangan fungsi aplikasi	BKPP	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Terintegrasi My SAPK	kematangan fungsi aplikasi	BKPP	√	√	√	√	√
	f	Sistem File Pegawai Elektronik (e-Filing ASN)	kematangan fungsi aplikasi	BKPP	√	√	√	√	√
	g	Sistem Absensi Online	kematangan fungsi aplikasi	BKPP	√	√	√	√	√
	h	Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SiHARKA)	kematangan fungsi aplikasi	BKPP	√	√	√	√	√
5	Aplikasi Akuntabilitas Kinerja								
	a	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
	b	Sistem Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP Reviu)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
6	Aplikasi Organisasi dan Tata Laksana								
	a	Sistem Informasi Proses Bisnis (SiProbis)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
	b	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB-Online)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
	d	Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (e-surveikpp)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
	f	Sistem monitoring dan evaluasi Organisasi (Simona)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
7	Aplikasi Data dan Informasi Pemerintahan								
	a	Sistem Informasi Satu Data (Polman Satu Data)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	b	Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (SJIGN)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
B	Peningkatan Kematangan Kapabilitas Fungsi Teknis Aplikasi Layanan Publik , mencakup:								
	1	Aplikasi Industri							
	a	Sistem Informasi Industri Nasional (SiINAS)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Industri Kecil dan Menengah	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√

	c	Klinik Desain Merek dan Kemasan (e-klinikdesainmerekemas)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
2	Aplikasi Perdagangan								
	a	Sistem Informasi Barang Pokok (Sibapok)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	b	Aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	d	Sistem Pelayanan Perizinan Kemetrolgian	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	f	Sistem Informasi Perlindungan Konsumen	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	g	Sistem Informasi Gerai Maritim (SIGM)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
3	Aplikasi Pertanian								
	a	Sistem Informasi Usulan Kegiatan Pertanian (e-Proposal)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Pertanian	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	d	Aplikasi Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (e-RDKK)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	e	Aplikasi Proteksi Pertanian (Protan)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	f	Aplikasi Pelaporan Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian (APIKLUHTAN)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	g	Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	h	Sistem Informasi Penguatan Data Pangan Strategis (siPDPS)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	i	Sistem Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	j	Sistem Informasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	k	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
4	Aplikasi Perkebunan								
	a	Sistem Informasi Perkebunan (SISBUN)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan Tanaman Perkebunan (SINTABUN)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
5	Aplikasi Peternakan								
	a	Sistem informasi kesehatan hewan Indonesia (iSIKHNAS)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Pasar Online Nasional Peternakan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan	√	√	√	√	√

		(SIMPONI)		Pangan					
	c	Sistem Identifikasi Rekording Ternak (SIDIK Peternakan)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Pertanian dan Pangan	√	√	√	√	√
6	Aplikasi Perikanan								
	a	Sistem Informasi Aplikasi Perikanan Perairan Darat (SIAPP)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√
	b	Aplikasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Nelayan Pintar (SINP)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√
7	Aplikasi Investasi								
	a	One Single Submission (OSS)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PMPTSP	√	√	√	√	√
	b	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik (SiCantik)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PMPTSP	√	√	√	√	√
8	Aplikasi Koperasi								
	a	Sistem Pendataan Koperasi/ Online Data System (ODS-Koperasi)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
9	Aplikasi Usaha Kecil Dan Menengah								
	a	Sistem Pendataan Usaha Kecil dan Menengah / Online Data System (ODS-UKM)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
	c	Sistem Laporan Akuntansi Usaha Mikro (LAMIKRO)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perindagkopukm	√	√	√	√	√
10	Aplikasi Pariwisata								
	a	Sistem Informasi Pariwisata	kematangan fungsi aplikasi	Dinas POP	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Ekonomi Kreatif	kematangan fungsi aplikasi	Dinas POP	√	√	√	√	√
11	Aplikasi Pekerjaan Umum								
	a	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PUTR	√	√	√	√	√
	b	Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah (SiPDJD)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PUTR	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Sumber Daya Air	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PUTR	√	√	√	√	√
	d	Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SimSPAM)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PUTR	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Cipta Karya (SIPPa)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PUTR	√	√	√	√	√
	f	Sistem Informasi Bangunan Gedung	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PUTR	√	√	√	√	√
	g	Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PUTR	√	√	√	√	√
	h	Sistem Informasi Penataan Ruang	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PUTR	√	√	√	√	√

12	Aplikasi Transmigrasi								
	a	Sistem Informasi Penyebaran Penduduk Transmigrasi (Sibaduktrans)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (Sipukat)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
13	Aplikasi Transportasi								
	a	Sistem Pendaftaran Online Pengujian Kendaraan Bermotor (NgeKIR Online)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√
14	Aplikasi Perumahan				√	√	√	√	√
	a	Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni (e-RTLH)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Rumkimtan	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SI-PKP)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Rumkimtan	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Rumkimtan	√	√	√	√	√
15	Aplikasi Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal								
	a	Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PMD	√	√	√	√	√
	b	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PMD	√	√	√	√	√
	c	Aplikasi Indeks Membangun Desa (e-IDM)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PMD	√	√	√	√	√
	d	Aplikasi Kader Pembangunan Manusia Dalam Pencegahan Stunting, Electronic Human Development Worker (e-HDW)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PMD	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PMD	√	√	√	√	√
	f	Sistem Informasi Desa Melawan Covid-19 (eDMC19)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PMD	√	√	√	√	√
	g	Sistem Informasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa (SIMABUMDES)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas PMD	√	√	√	√	√
16	Aplikasi Pertanahan								
	a	Sistem Informasi Pertanahan Pemerintah Daerah	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Rumkimtan	√	√	√	√	√
17	Aplikasi Kependudukan								
	a	Sistem Informasi Rencana Kerja dan Usulan SKPD DAK KB	kematangan fungsi aplikasi	Dinas P2KBP3A	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas P2KBP3A	√	√	√	√	√
	c	Aplikasi Keluarga Sejahtera	kematangan fungsi aplikasi	Dinas P2KBP3A	√	√	√	√	√
	d	Sistem Informasi Kampung KB	kematangan fungsi aplikasi	Dinas P2KBP3A	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Kependudukan (SIK)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dukcapil	√	√	√	√	√
	f	Aplikasi Layanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dukcapil	√	√	√	√	√

18	Aplikasi Pemerintahan daerah								
	a	Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja	kematangan fungsi aplikasi	SatpolPP	√	√	√	√	√
	b	Sisten Informasi Layanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	kematangan fungsi aplikasi	SatpolPP	√	√	√	√	√
19	Aplikasi Kesehatan								
	a	Sistem Informasi Kesehatan Generik (SIKDA)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Kawal Ibu Hamil	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Digitalisasi Alat Kesehatan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	d	Sistem Informasi Gizi Terpadu (sigiziterpadu)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Hepatitis dan PISP (SIHEPI)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	f	Sistem Informasi Tuberkolosis Terpadu	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	g	Aplikasi Info Alat Kesehatan dan PKRT	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	h	Sistem Informasi HIV/ Aids dan IMS	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	i	Sistem Informasi Surveilans	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	j	Sistem Informasi Manajemen Data Kefarmasian (simadafarmalkes)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	k	Sistem Informasi Puskesmas	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	l	Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	m	Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial (Sismonev) Kesehatan (JKN)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	n	Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan (SiSDMK)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	o	Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	p	Sistem Informasi Rawat Inap	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	q	Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	r	Sistem Informasi Manajemen Data Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan (Health Facilities Information System)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	s	Teknologi Telemedis Terintegrasi (Temenin)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
	t	Sistem Aset Manajemen Rumah Sakit	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
20	Aplikasi Sosial								
	a	Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
	b	Aplikasi Program Keluarga Harapan (e-PKH)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
	c	Aplikasi Seleksi Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (e-SDM PKH)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
	d	Aplikasi Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Daerah Rawan Bencana	kematangan fungsi aplikasi	BPBD	√	√	√	√	√
	f	Aplikasi Pemantauan Titik Panas (LAPAN Fire Hotspot)	kematangan fungsi aplikasi	BPBD	√	√	√	√	√

	g	Sistem Informasi Tingkat Bahaya Wilayah (InaRISK Personal)	kematangan fungsi aplikasi	BPBD	√	√	√	√	√
	h	Siystem For Multi Generation Weather Model Analysis and Impact Forecast (BMKG Signature)	kematangan fungsi aplikasi	BPBD	√	√	√	√	√
	i	Sistem Penerima Peringatan Informasi Gempa Bumi (WRS-BMKG)	kematangan fungsi aplikasi	BPBD	√	√	√	√	√
	j	Sistem Informasi Prakiraan Cuaca, Iklim, Udara dan Gempa Bumi (Info BMKG)	kematangan fungsi aplikasi	BPBD	√	√	√	√	√
21	Aplikasi Pemberdayaan Perempuan								
	a	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SINFONI PPA)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas P2KBP3A	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Kabupaten Layak Anak	kematangan fungsi aplikasi	Dinas P2KBP3A	√	√	√	√	√
22	Aplikasi Hukum								
	a	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Hukum Setda	√	√	√	√	√
	Aplikasi Hak Asasi Manusia								
	a	Sistem Informasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	kematangan fungsi aplikasi	Bagian Hukum Setda	√	√	√	√	√
23	Aplikasi Pendidikan								
	a	Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	b	Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	d	Aplikasi Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	e	Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	f	Aplikasi Rumah Belajar	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	g	Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIPI)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	h	Sistem Informasi PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
24	Aplikasi Ketenagakerjaan								
	a	Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial (Sismonev) Ketenagakerjaan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Transnaker	√	√	√	√	√
	b	Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Transnaker	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Transnaker	√	√	√	√	√
	d	Aplikasi Pencari Kerja (Karirhub)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Transnaker	√	√	√	√	√
25	Aplikasi Ilmu Pengetahuan								
	a	Aplikasi Pendaftaran, Pengukuran, dan Penilaian Inovasi Daerah	kematangan fungsi aplikasi	Bappeda Litbang	√	√	√	√	√
26	Aplikasi Teknologi								
	a	Sistem Informasi Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi	kematangan fungsi aplikasi	Bappeda Litbang	√	√	√	√	√

		Aplikasi Pemuda							
	a	Aplikasi Wirausaha Muda Pemula (WMP)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas POP	√	√	√	√	√
	b	Aplikasi Wirausaha Muda Berprestasi (wirausahaberprestasi)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas POP	√	√	√	√	√
	c	Sistem Informasi Kepemudaan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas POP	√	√	√	√	√
	27	Aplikasi Olahraga							
	a	Sistem Informasi Olah Raga Daerah	kematangan fungsi aplikasi	Dinas POP	√	√	√	√	√
	28	Aplikasi Lingkungan Hidup							
	a	Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas LHK	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas LHK	√	√	√	√	√
	c	Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN-SMART)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas LHK	√	√	√	√	√
	d	Sistem Informasi Data Alam	kematangan fungsi aplikasi	Dinas LHK	√	√	√	√	√
	29	Aplikasi Kebudayaan							
	a	Sistem Informasi Kebudayaan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	b	Aplikasi Data Pokok Kebudayaan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	c	Aplikasi Data Spasial Kebudayaan	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	d	Aplikasi Website Warisan Budaya Tak Benda (WBTb)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas Dikbud	√	√	√	√	√
	30	Aplikasi Informasi							
	a	Aplikasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik (e-PPID)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	b	Warta KominfoSP Online	kematangan fungsi aplikasi	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	31	Aplikasi Komunikasi							
	a	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	b	Sistem Informasi Layanan SPBE (Halo SPBE)	kematangan fungsi aplikasi	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
VI	Keamanan SPBE								
	A	Penyiapan dan Penerapan Standar Keamanan SPBE	Standar Keamanan SPBE	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	B	Penerapan Keamanan SPBE							
	1	Peningkatan Kesadaran Keamanan SPBE, mencakup : Sosialisasi Keamanan SPBE, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Kemanan SPBE, dan Koordinasi dan Konsultasi	Tumbuhnya Kesadaran Keamanan SPBE	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√

	2	Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE, mencakup : Inventarisasi Aset SPBE, Identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, Inventarisasi Infrastruktur SPBE, dan Mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE	Potensi Kerentanan Keamanan SPBE	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	3	Penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, mencakup : Standar teknis keamanan data dan informasi, Standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE, Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan, Standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan Standar teknis keamanan Pusat Data	Terpenuhinya standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	4	Menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE, mencakup : Identifikasi persyaratan minimum keamanan yang belum diterapkan, Memastikan pengkodean pemrograman aplikasi yang dibuat tidak memiliki kerawanan, Pemindaian otomatis dan/atau pengujian penetrasi sistem, Identifikasi kerentanan dan mengelola ancaman sejak awal siklus pengembangan Aplikasi SPBE, dan Analisis kerentanan	Kelaikan fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	5	Penanganan insiden Keamanan SPBE, mencakup : Identifikasi sumber serangan, Analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya, Prioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi, Dokumentasi bukti insiden yang terjadi dan Mitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE	Tertanganinya insiden Keamanan SPBE	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	C	Kelaikan Keamanan							
	1	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	2	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
VII	Audit SPBE								
	A	Audit Aplikasi	Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Aplikasi	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	B	Audit Infrastruktur	Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Infrastruktur SPBE	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√
	C	Audit Keamanan Informasi	Rekomendasi Perbaikan Keamanan Informasi	Inspektorat - Dinas KominfoSP	√	√	√	√	√

BAB V PENUTUP

Peta Rencana SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Peta rencana strategis SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap memperhatikan keselarasan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Visi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu, menyeluruh dan adaptif untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE. Guna memantapkan pencapaian sasaran SPBE, maka dirumuskan arah kebijakan, strategi dan peta rencana SPBE, yang mencakup 6 Area yaitu :

- a. Tata Kelola SPBE
- b. Manajemen SPBE
- c. Layanan SPBE
- d. Infrastruktur SPBE
- e. Aplikasi SPBE
- f. Keamanan SPBE
- g. Audit SPBE

Penyempurnaan dan pembaharuan Peta Rencana SPBE ini dilakukan dengan memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan evaluasi berkelanjutan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, termasuk perkembangan kondisi eksternal yang memerlukan penyempurnaan Peta Rencana SPBE.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Juli 2022

